

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Di ajukan Oleh:

T LUTHFAN JAHIDAN

NIM. 190801039

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : T Luthfan Jahidan

NIM 190801039

Program Studi : Ilmu Politik

Nama Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan ini saya yang bertanda tangan menyatakan bahwa skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan,*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya,*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data,*
5. *Mengerjakan sendiri karya inidan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur yang termasuk pernyataan diatas, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2025



Yang Menyatakan

T Luthfan Jahidan

**“PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
TERHADAP KOLABORASI PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

T Luthfan Jahidan
190801039

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002


Dr. Dede Suhendra, Sos.M.H

**“KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN PIDIE”
SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munasqasah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh
Dan dinyatakan lulus
Serta Di Serahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik Diajukan Oleh:

Oleh:

T Luthfan Jahidan

190801039

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,

Dr. Dede Suhendra, Sos, M.H

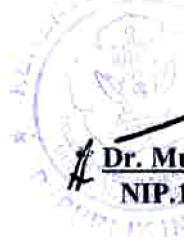
Penguji I,

Aklima, M.A.
NIP. 198810062019032009

Penguji II,

Renaldi Safriansyah, S.E., MHsc.
NIDN. 2007017903

**Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-raniry Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia S.A., M.A.g.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Uraian permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie mencakup beberapa aspek, antara lain peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan volume sampah ikut bertambah, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola pembuangan sampah, serta tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang belum berjalan merata. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Saat ini volume sampah yang timbul di Kabupaten Pidie terus meningkat. Banyaknya sampah hasil dari dapur rumah tangga yang dibuang sembarangan, serta minimnya upaya pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah-sampah tersebut berasal dari pasar, fasilitas umum dan pemukiman, maupun perkantoran. Jauhnya lokasi pembuangan akhir (TPA) dan keterbatasan sarana berupa bak penampungan sampah. Tujuan Penelitian ialah untuk menganalisa bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten pidie dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kebijakan pengelolaan sampah terhadap Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Pidie adalah bahwa saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk menghimbau masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan sosialisasi, menambah kelompok swadaya masyarakat, menyelenggarakan kegiatan program kampanye gerakan peduli lingkungan. Pemerintah daerah juga menghidupkan sinergitas Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membantu Pemerintah dengan Masyarakat untuk terus menjaga lingkungan yang diakibatkan oleh menumpuknya sampah yang meluap. Pemerintah dan pengelola sampah setempat mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti menambah fasilitas pengolahan, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kampanye kesadaran pada masyarakat. Dalam fasilitas pengolahan sampah adanya alat berat pengangkut sampah seperti Becak Bermotor pengangkut sampah yang menampung sampah di wilayah pemukiman, Eskavator, dan Mobil pengangkut sampah. Hal ini guna terwujudnya wilayah Kabupaten Pidie agar terbebas dari sampah. Mengenai faktor apa saja yang mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kabupaten Pidie ialah tempat pembuangan sampah yang difasilitasi tempat duduk untuk masyarakat membuang sampah, tukang sampah keliling, dan juga becak bermotor untuk sampah yang dipungut di setiap rumah warga. Tetapi keberhasilan tersebut tidaklah tertangani untuk ke setiap kampungnya karena banyaknya tumpukan sampah di kampung lain yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Masyarakat sepenuhnya belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan agar menjadi lebih baik lagi padahal banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Katakunci : Kebijakan Publik, Kolaborasi, Pemerintah, Masyarakat, Sampah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, dan karunianya, salawat kepada pahlawan dan kekasih yang telah mengasihi kita sebagai umatnya jauh sebelum kita diciptakan yaitu Muhammad SAW. Sehingga saya dapat, merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Dan Adapun judul yang saya tuliskan yakni *“Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Pidie”*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAG, selaku rektor UIN Ar-raniry.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry beserta jajarannya.
3. Ramzi Murziqin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik. Arif Akbar M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu Politik, dan Mumtazinur S.I.P.,M.A sebagai penasehat akademik (PA).
4. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Dede Suhendra, Sos., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Kepada kedua orangtua tercinta beserta keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangatkan dan membantu baik dari segi materil maupun non materil.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah

memberikan masukan beserta motivasi yang tidak henti-hentinya dari kalian yang menambah daya pacu semangat peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

7. Kepada informan yang sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung.
8. Segenap pihak yang hadir, membantu dan memberikan masukan serta kritik konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penggarapan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.
9. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berhasil dan mampu mencapai pada titik ini.

Banda Aceh, 30 Januari 2025

T Luthfan Jahidan



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Teori Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Teori Kolaborasi.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
4.1 Profil Kabupaten Pidie.....	31
4.1.1 Keadaan Geografis.....	31
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	32
4.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.....	34
4.3 Kebijakan pengelolaan sampah terhadap Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Pidie.....	35
4.3.1 Perumusan Masalah Kebijakan.....	36
4.3.2 Meramalkan Alternatif Kebijakan.....	38
4.3.3 Merekomendasikan Alternatif Kebijakan.....	41
4.3.4 Monitoring Kebijakan.....	43
4.3.5 Mengevaluasi Kinerja Kebijakan.....	45
4.2 Faktor Keberhasilan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah.....	46
4.2.1 Reward Keberhasilan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pidie.....	48
4.2.2 Turun Tangan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah.....	52
4.2.3 Faktor Pendorong Pemerintah Pidie Dalam Penjagaan keberhasilan....	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah dalam lingkungan hidup UU No. 32 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait sampah, yang mencakup pembuatan kebijakan, penyediaan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta edukasi dan pembinaan masyarakat. Peran ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai (1) Penyusunan Regulasi: Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah terkait. (2) Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan bank sampah. (3) Pengembangan Teknologi: Pemerintah berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang inovatif, termasuk teknologi pengolahan sampah menjadi energi (PLTSa). (4) Edukasi Masyarakat: Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya. (5) Fasilitator: Pemerintah memfasilitasi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak swasta, dalam pengelolaan sampah, misalnya melalui penyediaan modal

¹ Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). "Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma*", 7(1), 45-54.

dan pelatihan. (6) Regulator: Pemerintah menetapkan aturan dan standar pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. (7) Katalisator: Pemerintah mendorong dan mempercepat perkembangan pengelolaan sampah melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk memberikan insentif bagi pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. (8) Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan bank sampah dan pelatihan pengelolaan sampah.²

Desentralisasi pengelolaan sampah di Pidie merujuk pada upaya untuk mengelola sampah tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat kecamatan dan desa (gampong). Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kegiatan desentralisasi bisa seperti sebagai Pemerintah Desa: Membuat peraturan tentang pengelolaan sampah, membentuk kelompok kerja (Pokja) pengelola sampah, dan mengelola bank sampah di tingkat desa. Sebagai Masyarakat: Aktif dalam memilah sampah, mengikuti program edukasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan sampah. Pihak Swasta: Mendukung kegiatan pengelolaan sampah melalui investasi, teknologi, dan sumber daya lainnya.³

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu yang krusial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan volume sampah dengan jumlah penduduk yang besar dan pola konsumsi yang terus meningkat, Indonesia menghasilkan volume sampah yang signifikan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023, timbunan sampah nasional mencapai 69,9 juta ton, dengan 39,6 persen atau sekitar 27,7 juta ton tidak dikelola dengan baik. Komposisi sampah didominasi oleh sisa makanan (41,60 persen) dan plastik (18,71 persen), dengan sumber utama berasal dari rumah tangga (44,37 persen). Untuk permasalahan ini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengatur sistem pengelolaan sampah secara

² Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). "Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik". *Kesmas*, 8(8), 404-410.

³ Ridwanto, R., Arjuniadi, A., & Abdullah, H. (2024). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie". *MAFEBIS: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 54-68.

komprehensif dan berwawasan lingkungan⁴

Dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Pidie dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung sampah terhadap lingkungan dan kesehatan adalah terjadinya pencemaran air yaitu proses dengan adanya pencucian yang padat di permukaan air akibat sampah ini akan menjadi salah satu hambatan bagi pencemaran, entah itu air yang di permukaan maupun dari dalam tanah, serta adanya pembangunan sebuah sumur yang sering digunakan untuk kehidupan manusia nya dalam sehari-hari di dekat pemukiman ini akan sangat mengakibatkan kurang nya tingkat Kesehatan pada manusia dan penduduk setempat. Pada intinya tidak hanya tentang itu saja dan berpatokan dengan benda padat tetapi tercemarnya suatu ini timbulnya bermacam macam sumber pabrik serta industri-industri yang lain.dan tentunya terjadi sebuah pencemaran tidak hanya di permukaan air saja melainkan sampai ke tanah yang akan membuat air menjadi berubah sehingga hal ini tentunya akan berisiko bagi manusia.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber penyakit. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terurai dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca, seperti metana, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Permasalahan ini di per parah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008, mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Masalah pengelolaan sampah di Aceh, semakin mendesak dengan peningkatan volume sampah yang signifikan. Pada tahun 2023, rata rata sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banda Aceh mencapai 256 ton per hari, dengan total 93.506 ton per tahun, meningkat dari 90.174 ton pada tahun 2022. Kapasitas TPA telah melebihi batas sejak tahun 2019, sehingga menyebabkan sebagian sampah harus dialihkan ke TPA regional di Aceh Besar. Sampah sisa makanan mendominasi komposisi sampah, mencapai 60 persen diikuti oleh sampah plastik, botol, karet, dan kardus.

⁴ Ketut Aryana, dkk, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Pekerjaan Kepala Keluarga Dengan Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah", Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol 12 No, 1 Mei 2022.

Peningkatan volume sampah ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Banda Aceh. Secara keseluruhan, permasalahan sampah di Aceh memerlukan perhatian serius dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.⁵

Uraian permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie mencakup beberapa aspek, antara lain peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan volume sampah ikut bertambah, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengelola pembuangan sampah, serta tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang belum berjalan merata. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga beberapa aktivitas masyarakat yang seering dilakukan dalam kegiatan kesehariannya, sehingga muncul lah berbagai permasalahan yang terjadi yang dapat merugikan pihak individu maupun kelompok. Salah satu permasalahan yang muncul dan sering terjadi adalah masalah sampah yang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah, sehingga berdampak negatif bagi semua orang, yaitu sampah dapat membuat lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak sehat sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit contohnya penyakit kulit. Sampah juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap untuk di hirup sebagai oksigen bagi manusia dan juga banyaknya polusi udara yang menyengat, serta dapat menyebabkan banjir jika dibuang sembarangan ke saluran air.⁶

Dari hasil wawancara bersama pengelola TPA, beliau mengatakan Berbagai usaha telah dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun usaha tersebut menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah dalam pengelolaan sampah adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk penanganan, mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, hingga pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya populasi, dan juga jumlah produksi sampah yang juga terus semakin meningkat, sehingga efektivitas pengelolaan sampah perlu ditingkatkan yang dapat menyebabkan sampah sulit sekali dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa tahap

⁵ Rahmat Fajri, “TPA Banda Aceh Penuh Karena Produksi Sampah Naik Jadi 93 Ribu Ton”, Antara News, Diakses Pada 6 Januari 2024, Dikutip Pada 25 Desember 2024.

⁶ Ramadhan Asuka, “Studi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pidie Oleh Dinas Lingkungan Hidup”, diakses pada 23-06-2023, dikutip pada 25 desember 2024

yang perlu diperhatikan, seperti pengendalian timbulan sampah yang membludak, pengumpulan sampah agar sampah dapat berkurang, pengangkutan sampah dari berbagai kendaraan roda dua maupun empat, pengolahan sampah yang tertata dengan baik, dan pembuangan akhir yang bersih sehingga membuat masyarakat nyaman dalam beraktivitas.

Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah terhadap kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pidie. Kebijakan adalah suatu hal yang penting dalam mengatasi permasalahan yang ada pada ruang lingkup masyarakat. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang masih belum memadai, memperkuat implementasi kebijakan agar bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.⁷

Saat ini volume sampah yang timbul di Kabupaten Pidie terus meningkat. Banyaknya sampah hasil dari dapur rumah tangga yang dibuang sembarangan, serta minimnya upaya pemisahan sampah organik dan anorganik. Sehingga sampah-sampah tersebut yang berasal dari beberapa pasar-pasar yang ada di Pidie, fasilitas umum dan juga pemukiman masyarakat setempat, maupun perkantoran dan instansi, dikarenakan jauhnya lokasi pembuangan akhir (TPA) dan juga faktor keterbatasan sarana berupa bak penampungan sampah, sementara masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah sehingga masyarakat tidak peduli tentang pengelolaan sampah yang baik, padahal seharusnya permasalahan ini adalah hak dan juga kewajiban bersama. Hal ini dibuktikan dengan urangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Berikut adalah data jumlah sampah (m³/hari) dari tahun 2020 – 2024 menurut SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional).

No.	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Tahun
1.	553,00	2020
2.	3,10	2021

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada tahun 2022.

3.	175,76	2022
4.	177,08	2023
5.	179,23	2024

1.1 Data SIPSN Timbulan Sampah di Kabupaten Pidie.⁸

Dari tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Kabupaten Pidie meningkat. Sampah rumah tangga yang diolah di tempat pemrosesan akhir (TPA) berasal dari 69 gampong yang tersebar di 14 kecamatan di Pidie. Dengan kata lain, dari total 730 Gampong di 23 kecamatan di Pidie, baru 69 gampong yang terlayani pelayanan persampahan. 14 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Grong-Grong, Padang Tiji, Mutiara, Mutiara Timur, Titeue, Sakti, Tiro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Delima, Glumpang Tiga, dan Indrajaya. Dalam pengelolaan sampah harus diperhatikan lagi agar merata dan juga agar terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat karena lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap manusia, yang sebagaimana yang ditekankan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengamanatkan kepada masyarakat dan pemerintah atau pun swasta agar mengimplementasikan kebijakannya dalam setiap kegiatan di lapangan agar hak asasi manusia setiap orang terpenuhi.⁹

Saat ini, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Pidie adalah adanya perkembangan penduduk pidie yang sangat pesat, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan beragam karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Dengan adanya peningkatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penambahan volume sampah sehingga berdampak sangat negatif lingkungan menjadi kurang bersih dan juga kurang sehat. Hal ini membutuhkan adanya

⁸ SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), dikutip pada 30 Januari 2025.

⁹ Hansyar, Ricky Muliawan, and Halimah. "Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah di Sigli Kabupaten Pidie.", Jurnal Sains Riset 12.1 (2022): 59-64.

kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten pidie untuk menjadikan Kabupaten Pidie yang lebih bersih dan sehat. Sampah menurunkan makna kecantikan suatu kota dan wilayah apabila penanganannya buruk dan juga tidak baik. Sampah juga menyebabkan suatu polusi udara dan juga bau yang menyegat yang akan mengakibatkan banjir jikalau sampah dibuang sembarangan ke saluran air.¹⁰

Maka dari itu, dengan adanya lembaga pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki tanggung jawab harus ikut serta dalam menangani masalah lingkungan di daerah dan salah satunya adalah mengatasi masalah sampah. Dinas lingkungan hidup kabupaten Pidie merupakan salah satu badan yang menyediakan pelayanan publik dan juga pelayanan untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dengan menangani dan mengelola sampah-sampah yang berada di sekitar lingkungan masyarakat dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan sebagai bentuk kewajiban agar dapat meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di Kabupaten Pidie.

Masalah sampah harus ditangani dengan serius melalui pendekatan teknis, operasional, dan juga manajemen yang tepat serta terintegrasi, sesuai dengan kondisi dan kebijakan daerah di Kabupaten Pidie. Selain itu juga, terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM), yaitu petugas kebersihan dan fasilitas pengangkutan sampah yang tersedia dalam layanan pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Dari sejumlah gampong yang ada di Kabupaten Pidie, misalnya di Sigli, dari 15 gampong, hanya 11 gampong yang mendapatkan layanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan 4 gampong lainnya belum mendapatkan akses layanan pengangkutan sampah. Sangat penting untuk mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut. Pemerintah Pidie (instansi terkait) diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar serta menemukan cara yang efektif untuk membatasi peningkatan produksi sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah berbahaya.¹¹

Penelitian mengenai masalah sampah di Kabupaten Pidie masih belum

¹⁰ Hansyar, Ricky Muliawan, and Jasmadi. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kota Sigli." *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains* 1.1 (2022).

¹¹ Candra Saysima, "Perhari, 39 hingga 42 Ton sampah diolah di TPA Cot Padang Nila dengan sistem *Controlled Landfill*", diakses pada 6 Februari 2024, dikutip pada 30 Januari 2025.

banyak dilakukan. Beberapa celah penelitian (gap penelitian) yang bisa diidentifikasi meliputi: (1) Penelitian tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Pidie, terutama terkait pencemaran air dan tanah, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat setempat. (2) Penelitian tentang perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya tentang tingkat kesadaran, partisipasi, dan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan membuang sampah. (3) Penelitian tentang potensi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah di Pidie, seperti pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk, daur ulang sampah anorganik, dan pengelolaan sampah medis. (4) Penelitian tentang model pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Pidie.

Oleh karena itu adanya judul *“Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Pidie”*, Skripsi ini menjelaskan bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang sangat diperlukan untuk kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie serta menjelaskan dan mengungkapkan faktor apa yang mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kabupaten Pidie.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kabupaten Pidie ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten pidie
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengelola sampah di Kabupaten Pidie

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat untuk Universitas
Penelitian ini mampu untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah terhadap kolaborasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten Pidie. Temuan baru dari skripsi ini adalah untuk memperkaya basis pengetahuan dan pengembangan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk masalah beserta solusinya.
 - b. Manfaat untuk Mahasiswa Prodi Ilmu Politik
Penelitian ini mampu melihat bagaimana makna Politik Lingkungan yang sebenarnya untuk memperjelas suatu sistem pemerintahan dengan cara melihat bagaimana pengaruh kebijakan regulasi terhadap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan

sampah di kabupaten pidie dalam perspektif politik lingkungan.

2. Manfaat Praktik

a. Manfaat untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat mendukung Pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan. Sehingga memberikan data dan informasi yang relevan bagi Pemerintah Daerah untuk memahami bagaimana kondisi lingkungan setempat. Pemecahan masalah daerah yang dirancang dalam skripsi memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan lingkungan. Adanya skripsi ini, dapat meningkatkan keterlibatan akademisi dalam pembangunan daerah dan memperkuat sinergi dalam membangun wilayah secara ilmiah dan inovatif.

b. Manfaat untuk Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan untuk masyarakat, terutama dalam memberikan solusi, inovasi, dan kontribusi ilmiah terhadap masalah yang dihadapi. Dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi yang relevan tentang bagaimana kondisi lingkungan yang terjadi. Dalam melibatkan masyarakat secara langsung, dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan baru.

A R - R A N I R Y